KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Gedung Perlemen-Pengamat:jangan dijadikan proyek dan bancakan
**Tanggal** : Kamis, 07 Mei 2015
**Surat Kabar** : Pelita
**Halaman** : 3

GEDUNG PARLEMEN

# Pengamat: Jangan Dijadikan Proyek dan Bancakan

**Jakarta, Pelita**

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendukung jika penataan ulang gedung parlemen sebagai simbol lembaga negara dan untuk peningkatan kinerja anggota dewan.

Hal itu disampaikan Siti Zuhro dalam diskusi Dialog Kenegaraan "Rencana Pengembangan Komplek Parlemen' bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (6/5).

Dukungan itu diberikannya dengan catatan, penataan ulang Gedung Parlemen itu bukan untuk proyek dan bancaan. "Publik sudah trauma dan pobia, karena semua proyek dimana saja, termasuk di gedung parlemen itu jadi ajang korupsi," katanya.

Ditegaskannya, harus ada korelasi, relevansi dan koneksitas pembangunan gedung baru itu dengan kinerja anggota parlemen. "Korelasi itu harus dilakukan untuk parlemen jangka panjang, yang penting bukan untuk proyek dan bancakan," papar dia.

Dengan pembangunan gedung baru itu kata Siti, bagaimana kinerja wakil rakyat itu bisa dipantau, bisa dikontrol dan diawasi langsung oleh rakyat, karena mereka wakil rakyat dan diggji dengan uang rakyat.

"Gedung yang ada ini memang sudah tidak layak, apalagi ini rumah rakyat, dan tidak boleh terbengkalai, semua supporting harus bagus. Kami harapkan untuk transparansi dan akuntabelitas," ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan dengan pengembangan gedung baru MPR, DPR dan DPD RI yang modern bisa menjadi pusat pembelajaran pengawasan.

Karena itu lanjut dia, dibutuhkan ruang perpustakaan, musium, dan tenaga ahli yang memadai, sehingga parlemen ini akan menjadi *think-thonk* bagi produk-produk kinerja DPR dan DPD RI.

"Parlemen itu sebagai pusat pengetahuan dan perjalanan kolektif bangsa. Perlu perpustakaan, museum, tenaga ahli agar produk-produk yang dihasilkan sesuai harapan rakyat dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Kini ada 78 penelitI DPR yang belum merdapat pelayanan dengan layak," tegas Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.

Dia menyontohkan Gedung Nusantara I DPR yang dibangun tahun 1997, yang semula kapasitasnya hanya untuk 800 orang, kini yang bekerja dari 560 anggota ditambah masing-masing anggota dua tenaga ahli dan satu orang staf. Jumlahnya sudah 2240 orang.

Apalagi rencana kedepan akan ada lima tenaga hali, dua orang staf plus 560 anggota menjadi 4.480 orang. "Lima tenaga ahli itu untuk mendukung legislasi, budget, pengawasan, representasi, dan diplomasi," papar Fadli.

Di Inggris dan Amerika Serikat jelas dia, ruang perpustakaannya luar biasa bagus. "Sampai-sampai rakyat antrian masuk, padahal membayar. Hanya untuk mengunjungi perpustakaan dan museum, sehingga gedung parlemen itu menjadi tempat berkunjung yang nyaman dan memberi pengetahuan," tambahnya.

Mengenai apakah pembangunan gedung itu berkorelasi dengan kualitas anggota parlemen, menurut Fadli Zon, itu tidak bisa lepas dari asal-muasal anggota DPR RI terpilih, yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu.

"Jadi, agar mendapat anggota DPR berkualitas, maka mesti ada pendidikan bagi pemilih, sehingga memilih itu bukan karena uang, bukan karena blusukan, dan pencitraan yang lain," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPD Farouk mengakui pembangunan gedung itu dibutuhkan, apalagi DPD RI belum mempunyai gedung dan masih numpang ke MPR RI, sehingga kalau mau bersidang, DPD selalu mengirim surat permimjaman gedung tersebut kepada MPR RI.

"Jadi, DPD RI mendukung pengembangan gedung ini dan perlu ditata kembali tapa menghilangkan yang sudah ada," kata anggota DPD RI dari Dapil NTB ini.

Menurut Farouk, pengembangan gedung itu berdasarkan kepentingan, lalu ada gagasan, probability, pemanfaatan yang benar dan maksimal. "Jadi, pembangunan gedung itu kebutuhan," tegas dia. (kh)